

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini studi Hubungan Internasional kian berkembang semakin pesat secara epistemologis, ontologis, maupun metodologis. Mengingat studi ini membahas mengenai dinamika peristiwa internasional, maka fokus kajian, metode, dan teorinya pun berubah-ubah secara cepat dengan sendirinya mengikuti perkembangan dari peristiwa internasional. Perkembangan studi ini dapat dilihat dari perbedaan definisi studi HI pada masa Perang Dingin dan masa sekarang. Studi HI menjadi disiplin ilmu yang luas dan dinamis dengan tidak lagi hanya berpusat pada negara sebagai aktor utamanya. Aktor-aktor non-negara bermunculan selaras dengan isu-isu HI yang semakin meluas akibat dari adanya globalisasi. Mulai dari *International Governmental (IGO)*, *Non-Governmental Organization (NGO)*, *Multinational Corporation (MNC)*, bahkan kita sebagai individu memiliki *power*. Para aktor tersebut berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan internasional, kemudian saling berinteraksi serta menjalin kerja sama internasional antar negara. Isu-isu HI tidak lagi seputar kekuasaan dan peperangan, namun berkembang dan muncullah isu-isu hak asasi manusia, bantuan luar negeri, bantuan kemanusiaan, isu lingkungan, kejahatan transnasional, penyakit menular, kemiskinan, isu perempuan dan kesetaraan gender, dan masih banyak lagi.

Mingst menyebutkan bahwa studi HI adalah tentang: *“Interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, serta individu. HI adalah studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individual maupun bersama-sama dalam proses politik internasional.”* (Hadiwinata, 2018). Hadir kelompok organisasi non-pemerintah peduli perempuan yang turut serta membantu tercapainya kesetaraan gender dan menghapus

diskriminasi pada perempuan. Hadir pula kelompok organisasi non-pemerintah peduli lingkungan yang terus mengangkat isu perubahan iklim. Hingga kelompok-kelompok organisasi non-pemerintah yang peduli hak asasi manusia dan turut membantu mempromosikan isu hak asasi manusia dan perlindungannya, salah satunya adalah Save The Children.

Save The Children termasuk ke dalam organisasi internasional non-pemerintah yang didirikan oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1919 di London setelah berakhirnya Perang Dunia I (Children, n.d.). Save The Children dibentuk atas inisiatif Eglantyne Jebb yang pada saat itu melihat anak-anak terlantar dan kelaparan akibat dari Perang Dunia I. Jebb terus memperjuangkan dan melindungi hak-hak anak hingga pada tahun 1923, Ia mengubah pandangan dunia terhadap anak-anak dengan merancang Deklarasi Hak-hak Anak untuk pertama kalinya. Kemudian rancangan tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 dan menjadi hukum internasional pada tahun 1990 yang saat ini dikenal dengan Konvensi Hak-hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*.

Save The Children memfokuskan kinerjanya pada isu perlindungan anak dengan visi *child rights to maximum development* (hak anak untuk berkembang semaksimal mungkin), *child rights to protection* (hak anak untuk mendapatkan perlindungan), *child rights to participation* (hak anak untuk berpartisipasi), dan *child rights to survival* (hak anak untuk bertahan hidup). Demi mewujudkan cita-cita terpenuhinya hak-hak dasar anak, Save The Children telah bekerja sama dengan lebih dari 120 negara di dunia yang mencakup Eropa, Asia, Afrika, Australia, hingga Timur Tengah. Selain bekerja sama dengan berbagai negara di dunia, Save The Children pun bermitra dengan organisasi lokal sekaligus menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk membangun dan memberdayakan komunitas yang dibutuhkan oleh anak-anak.

Sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1976, Save The Children telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dengan menjalankan program-program yang sangat terencana dan berpengaruh langsung terhadap perlindungan anak dalam jangka panjang, baik itu di bidang kesehatan,

pendidikan, maupun perlindungan anak. Save The Children sendiri telah bermitra dengan pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan, Departemen Kesejahteraan Sosial, Departemen Kesehatan dan Departemen Pemberdayaan Perempuan baik di tingkat provinsi, nasional, maupun kabupaten.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia (Indonesia T. C., 2022). Sayangnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia belum berbanding lurus dengan kualitasnya. Pembangunan sumber daya manusia masih menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih rendah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun faktanya, masih banyak anak di Indonesia yang bahkan tidak mendapatkan pendidikan sekolah dasar.

Beberapa daerah di Indonesia belum bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Sulitnya akses ke beberapa lokasi membuat pendidikan menjadi tidak mudah untuk dijangkau. Beberapa lokasi tersebut masih belum memiliki infrastruktur yang memadai. Ditambah tenaga pendidik yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum mendukung proses belajar mengajar. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat membuat pemahaman mereka tentang pendidikan menjadi rendah. Salah satu daerah dengan mutu pendidikan yang rendah ialah Kabupaten Sumba Barat di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kualitas pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan di Sumba Barat masih terlalu rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di Sumba Barat tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut di antaranya mulai dari faktor kependidikan, tenaga pendidik, hingga motivasi siswa dan dukungan orang tua. Selain itu, faktor proses pembelajaran, sarana pembelajaran, dan lingkungan yang kondusif juga turut berkontribusi ke dalam kualitas pendidikan di Sumba Barat.

Beberapa faktor tersebut harus terus dibenahi agar kualitas pendidikan di beberapa wilayah timur Indonesia menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya diperlukan di Pulau Jawa dan kota-kota besar saja, namun

juga di luar pulau Jawa dan kota kecil lainnya. Pendidikan yang mapan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan di masa yang akan datang nanti. Tetapi meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah tetap tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak kerja keras dan kerja sama dari seluruh *stakeholder* yang ada.

Save The Children sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak anak, berfokus untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah Indonesia. Save The Children menginisiasi beberapa program dalam bidang pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak agar mencapai potensi penuh dalam kehidupan mereka dan berkontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Save The Children telah hadir selama 9 tahun untuk berfokus dalam melaksanakan program pendampingan anak yang salah satunya menysasar ke dalam bidang pendidikan di Provinsi NTT, dengan Kabupaten Sumba Barat yang paling banyak mendapatkan program pendampingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah “Bagaimana peran Save The Children Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Melalui Program Pendidikan Dasar di Sumba Barat?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan konsep Development NGO yang dicetuskan oleh Philip Eldridge. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang bertujuan untuk memahami NGO Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh NGO Indonesia sendiri ataupun oleh para peneliti lainnya. Salah satu dari para peneliti ini adalah Philip Eldridge. Eldridge memahami dan mendefinisikan NGO dengan menguraikan kerangka teoritis, yakni membagikan NGO Indonesia ke dalam dua kategori. Kategori pertama yakni “*Development NGOs*” yang mengacu pada organisasi yang memfokuskan dirinya pada program konvensional pembangunan masyarakat, seperti irigasi, kesehatan,

peternakan, pertanian, kerajinan tangan, dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Lalu kategori kedua ialah “*Mobilization NGOs*” yang kinerja utamanya berfokus pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak hukum atas kepemilikan tanah dan kompensasi, hak pedagang kecil, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan penghuni liar di kota-kota besar (Fakih, 1991).

Kemudian Eldridge juga menguraikan model hubungan antara NGO Indonesia dengan pemerintah dilihat dari dimensi orientasi NGO dan kegiatannya, yang dibagi ke dalam tiga model (Gaffar, 2006). Model pertama adalah *High Level Partnership: Grassroots Development*, di mana NGO dengan tipe ini sangat partisipatif. Mereka lebih mengutamakan pada pembangunan daripada hal-hal yang sifatnya politis. Tetapi mereka juga memberikan perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka selalu memelihara dukungan pada tingkat *grassroots* namun juga tidak jarang terlibat dalam kegiatan yang besar. Sehingga mereka lebih mengutamakan kegiatannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada advokasi. Lalu model kedua disebut dengan *High Level Politics: Grassroots Mobilization*. NGO dengan model ini cenderung aktif dalam kegiatan politik dan bersifat advokatif. Fokus mereka adalah berusaha mendukung “peningkatan kesadaran politik” masyarakat serta memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan politik. Pada umumnya mereka tidak begitu saja dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah. Apabila ada, mereka di antaranya telah mendapatkan proyek-proyek penelitian dari pemerintah.

Lalu model ketiga disebut dengan *Empowerment at the Grassroots*. NGO model ini memfokuskan kegiatannya untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pada tingkat *grassroots*. Mereka tidak terlalu berminat berhubungan dengan pejabat pemerintah dan tidak memusatkan perhatiannya untuk berkampanye mengadakan perubahan. NGO model ini mempercayai bahwa perubahan akan muncul apabila kapasitas masyarakat meningkat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Mereka juga tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang berskala besar. Gambaran lebih jelas mengenai tiga model hubungan antara NGO dengan negara digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Model-model NGO

Orientasi	<i>High Level Partnership: Grassroots Development</i>	<i>High Level Politics: Grassroots Mobilization</i>	<i>Empowerment at the Grassroots</i>
Kerja sama dengan Program Pemerintah?	Ya	Terbatas	Tidak
Pembangunan atau Mobilisasi?	Pembangunan	Mobilisasi	Mobilisasi
Penetrasi Negara	Medium	Tinggi	Rendah
Hubungan antara Kelompok Kecil dan NGO	Semi-independent	Saling Mendukung	Otonom
Orientasi dengan Bergantung Negara	Akomodatif	Untuk Perubahan	Keadaan

Tabel 1.1. Sumber: Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, 2006.

Hubungan antara negara dengan NGO tidak dapat dipisahkan dan bersifat kompleks. Di tiap negara, NGO memiliki peranan yang sangatlah besar dalam kehidupan sehari-hari. Negara dengan fungsi demokrasi yang baik tidak akan menganggap NGO sebagai suatu ancaman terhadap kekuasaan pemerintah. Mereka bahkan dapat menjalin kerja sama karena bisa mengisi ruang publik dalam rangka pembentukan agenda publik. Namun, apabila dalam suatu negara di mana kondisi politiknya tidak menunjukkan adanya demokrasi maka hubungan antara NGO dengan negara dapat dikatakan tidak baik. Negara seringkali menganggap NGO sebagai suatu ancaman terhadap kekuasaan pemerintah.

Dari topologi NGO Indonesia yang dikemukakan oleh Philip Eldridge, Mansour Fakih melihat bahwa topologi tersebut cenderung melihat fenomena NGO Indonesia dari perspektif program kegiatannya dan metodologinya saja. Oleh karena itu, Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial mengemukakan alat analisis untuk lebih memahami NGO Indonesia. Alat tersebut yang akan membantu kalangan NGO Indonesia agar dapat

lebih memahami topologi NGO Indonesia yang diderivasikan dari pandangan aktivis NGO tentang bagaimana mereka mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasinya bagi program aksinya. Topologi NGO Indonesia tersebut digolongkan ke dalam tiga paradigma yang didasarkan pada seluruh aspek yang terdiri dari: asumsi dasar dan definisi masalah, metodologi dan program aksi mereka, asumsi mereka tentang sifat-sifat masyarakat, sasaran dan tujuan kegiatan mereka, dan lain-lainnya.

Paradigma yang pertama ialah paradigma Konformisme dengan akar masalah penyebab ketidakberdayaan masyarakat lebih disebabkan karena takdir Tuhan, nasib yang buruk, dan keadaan rakyat setempat. Sehingga perlu untuk membantu mengurangi penderitaan mereka, contohnya dengan cara memberikan derma dan mendoakan mereka. Program yang dilakukan oleh NGO ini misalnya perawatan anak, bantuan kelaparan, rumah panti, hingga klinik. NGO dengan tipe konformisme sangat percaya pada pemerintah dan sering dikenal bekerja tanpa teori.

Selanjutnya, tipe yang kedua ialah Reformasi. Akar masalah ketidakberdayaan masyarakat dalam tipe ini disebabkan karena lemahnya pendidikan, penduduk yang berlebihan, nilai-nilai tradisional, hingga korupsi. Sasaran mereka adalah meningkatkan produksi, membuat struktur yang telah ada bekerja, dan mengubah nilai-nilai rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut NGO ini melaksanakan program seperti pelatihan teknis, pengembangan masyarakat, hingga bantuan hukum. NGO dengan tipe ini bersifat partisipatif dengan pemerintah dan menganut ideologi modernisasi dan developmentalis.

Terakhir, tipe yang ketiga ialah Transformasi. Pada tipe ini, ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh adanya eksploitasi, struktur yang timpang, dan hegemoni kapitalis. Oleh karena itu NGO dengan tipe ini menyasarkan kegiatannya untuk menentang eksploitasi, membangun struktur perekonomian / politik baru dan kontra diskursus. NGO dengan tipe ini menekankan pada kritik struktural, yang sering dikatakan berpegangan pada konsep alternatif dalam melakukan perubahan sosial. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel berikut ini:

Peta Paradigma LSM

	Konformisme	Reformasi	Transformasi
Sebab-sebab masalah	- keadaan rakyat setempat - takdir Tuhan - nasib buruk	- lemahnya pendidikan - penduduk yang berlebihan - nilai-nilai tradisional - korupsi	- eksploitasi - struktur yang timpang - hegemoni kapitalis
Sasaran	- mengurangi penderitaan - mendoakan - mengharapkan	- meningkatkan produksi - membuat struktur yang ada bekerja - mengubah nilai-nilai rakyat	- menentang eksploitasi - membangun struktur perekonomian/politik baru - kontra-diskursus
Program	- perawatan anak - bantuan kelaparan - klinik - rumah panti	- pelatihan teknis - bisnis kecil - pengembangan masyarakat - bantuan hukum - pelayanan suplementer	- penyadaran - pembangunan ekonomi alternatif - serikat buruh - koperasi
Tipe perubahan dan asumsi	Fungsional / Keseimbangan		Kritik Struktural
Tipe Kepemimpinan	- percaya pada pemerintah - konsultatif	- partisipatif - memiliki tanggung jawab bersama	- fasilitator partisipatif - disiplin yang kuat
Tipe pelayanan	- memberi derma kepada yang miskin - kesejahteraan	- membantu rakyat untuk menolong dirinya sendiri - Revolusi Hijau - pembangunan komunitas - pendidikan nonformal - pendidikan kejuruan	- land reform - riset partisipatif - popular education
Inspirasi	- Konformasi	- Reformasi	- Emansipasi - Transformasi

Tabel 1.2. Sumber: Mansour Fakh, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, 1996.

Dalam penelitian ini, Save The Children merupakan organisasi internasional non pemerintah yang telah bekerja sama dengan lebih dari 120 negara

di seluruh dunia yang memfokuskan kinerjanya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di dunia, salah satunya pada isu pendidikan dasar anak di Indonesia. Penulis menganalisis bahwa Save The Children merupakan organisasi internasional non pemerintah yang termasuk dalam kategori Development NGO yang menjalankan tujuannya untuk pembangunan masyarakat, yang dalam hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung layanan pendidikan anak yang berkualitas di Sumba Barat. Program tersebut berdurasi selama 10 tahun dan bertujuan untuk menjangkau 100.000 anak dan komunitas terkait (Pasolapos, 2022). Peningkatan layanan pendidikan tersebut dimulai dari program sekolah dasar dengan peningkatan kemampuan literasi anak dan kapasitas guru (Kaha, 2022).

Kemudian, dilihat dari hubungan Save The Children dengan pemerintah maka Save The Children termasuk ke dalam kategori NGO dengan model *High Level Partnership: Grassroots Development*. Save The Children melakukan pemberdayaan pendidikan dasar anak pada level *grassroots* dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Mereka memastikan agar program-program yang sudah terlaksana dapat terus berlanjut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas (Barat, 2021). Lalu dari ciri-ciri topologi NGO Mansour Fakih yang disebutkan sebelumnya, penulis menganalisis bahwa Save The Children merupakan NGO dengan tipe Reformasi. Save The Children memutuskan untuk terjun ke Sumba Barat karena lemahnya kondisi pendidikan di sana. Untuk meningkatkan kondisi pendidikan di Sumba Barat, Save The Children menciptakan berbagai program dengan mengintervensi berbagai elemen termasuk melalui pengembangan masyarakat.

D. Argumen Riset

Berdasarkan kerangka pemikiran Development NGO oleh Philip Eldridge, argument riset yang dibangun adalah Save The Children sebagai INGO pada sektor *grassroots* dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar anak di Sumba Barat melalui tiga cara, di antaranya penguatan kapasitas di kalangan anak-anak,

meningkatkan peran dan kapasitas guru, serta membangun kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan provinsi.

E. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana peranan, usaha, serta strategi yang dilakukan oleh Save The Children dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar anak di Sumba Barat. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dialami dan sejauh mana keberhasilan dari program yang dijalani.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada peran Save The Children dalam pemberdayaan pendidikan dasar anak di Sumba Barat dengan rentang waktu penelitian tahun 2017-2023. Hal ini dikarenakan Program Pendidikan Dasar dari Save The Children mulai diinisiasi di Sumba sejak tahun 2014 dan akan berlangsung hingga tahun 2024.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan data-data deskriptif serta menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena atau peristiwa seseorang maupun kelompok terhadap sesuatu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara dan Studi Pustaka (*library research*). Teknik wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang terencana dengan narasumber kemudian direkam. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan dari literatur di antaranya buku, jurnal, maupun artikel. Data-data

mentah tersebut kemudian disaring lalu peneliti memilih data yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, peneliti akan membagi pembahasan ke dalam empat bab, dengan perincian dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen riset, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Permasalahan umum pendidikan dasar anak di Sumba Barat

Bab ini berisi pembahasan mengenai kondisi pendidikan dasar anak di Sumba Barat, mulai dari kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan pendidikan, serta lingkungan pendidikan yang kurang memadai.

BAB III : Peran dan posisi Save The Children dalam pemberdayaan pendidikan dasar anak di Sumba Barat

Bab ini berisi pembahasan mengenai langkah-langkah, peran serta sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh Save The Children dalam pemberdayaan kualitas pendidikan dasar anak di Sumba Barat.

BAB IV : Kesimpulan

Bab ini berisi penutupan berupa kesimpulan yang didapatkan melalui analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini.